

DINAMIKA PELAKSANAAN PEMERINTAHAN NAGARI DI PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023

Artha Dini Akmal^{1,b}, Yuliarti², Iip Permana³, Hidayatul Fajri⁴

^{1,2,3}Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

^barthadiniakmal@fis.unp.ac.id

Abstract

The implementation of the Nagari government in West Sumatra in 2023 still cannot be said to be good overall. There are still many problems that must be resolved by the Nagari government, and this seems like a job that must be completed in 2024. After carrying out research, it turned out that the problems faced by the Nagari government were quite diverse, starting from Nagari-Owned Business Entities that were not yet running to problems that were directly related to the community. This is a challenge that the Nagari government must immediately face in 2024, so that the implementation of the Nagari government will be more optimal and with minimal problems, the benefits felt by the community from the Nagari government's programs will be better. This research was prepared using a qualitative approach. The approach used was qualitative and descriptive methods and research informants were determined using purposive sampling techniques. The results of the research show that the Nagari Government always tries to resolve the problems and obstacles that occur in the implementation of Nagari government programs, even though the efforts made have not yet received maximum benefits. In the future, we really hope for assistance from various stakeholders to help the Nagari governments solve these problems, both from higher levels of government and from the academic sector such as universities.

Keywords: *Governance, local governance, nagari's governance*

Abstrak

Pelaksanaan pemerintahan Nagari di Sumatera Barat pada tahun 2023 ternyata masih belum bisa dikatakan baik secara keseluruhan. Masih ada banyak masalah yang harus diselesaikan oleh pemerintahan Nagari, dan ini seperti sebuah pekerjaan yang segera harus diselesaikan pada tahun 2024 mendatang. Setelah dilaksanakan penelitian ternyata masalah-masalah yang dihadapi oleh pemerintahan Nagari cukup beragam, mulai dari Badan Usaha Milik Nagari yang belum berjalan sampai pada persoalan-persoalan yang memang berhubungan langsung dengan masyarakat. Hal ini merupakan tantangan yang harus segera di hadapi oleh pemerintahan Nagari pada tahun 2024, agar pelaksanaan pemerintahan Nagari akan lebih optimal dan dengan minimnya masalah maka manfaat yang dirasakan oleh masyarakat terhadap program-program pemerintahan Nagari lebih baik. Penelitian ini disusun dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif serta metode deskriptif dan informan penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintahan Nagari selalu berusaha untuk menyelesaikan masalah-masalah dan hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan prograam-program pemerintahan Nagari, walaupun usaha yang dilakukan masih belum terasa manfaatnya secara

maksimal. Kedepannya sangat diharapkan bantuan dari berbagai macam stakeholder untuk membantu pemerintahan-pemerintahan Nagari ini dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut, baik dari level pemerintahan yang lebih tinggi maupun dari sektor akademisi seperti Perguruan Tinggi.

Kata kunci: pemerintahan, pemerintahan daerah, pemerintahan nagari

Pendahuluan

Pemerintahan Nagari merupakan pemerintahan terkecil di Sumatera Barat, sama halnya dengan Pemerintahan Desa (Akmal & Nurhabibi, 2020). Pada tingkat lokal adanya keistimewaan bagi nagari untuk tidak menggunakan desa dalam identifikasi wilayahnya sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Daerah yang berlaku di wilayah ini (Rozikin, 2019). Pemerintahan Nagari secara administratif sama dengan Pemerintahan Desa, tetapi memiliki unsur yang berbeda dengan masih mempertahankan kearifan lokal dan memakai adat istiadat dalam mekanisme pelaksanaan tata pemerintahan (Syamsurizaldi, Annisa Aulia Putri, 2019).

Dalam melaksanakan tugasnya, Pemerintahan Nagari pada dasarnya melaksanakan program-program dan usaha-usaha untuk mewujudkan Nagari yang lebih maju dan sejahtera (Rahmadoni et al., 2022). Program-program yang dilaksanakan oleh pemerintahan Nagari ini nantinya akan menjadi motor penggerak dari kesejahteraan ekonom, sosial dan budaya masyarakat (Asfarina & Frinaldi, 2019). Penentuan program apa saja yang akan dijalankan oleh pemerintahan Nagari berdasarkan pada hasil Musrembang dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat (*Berita Pemerintah Kabupaten Tanah Datar - Hidupkan Filosofi Gotong Royong, Nagari Tageh Diusung Hadapi Pandemi Covid-19*, n.d.). Tidak terkecuali juga pemerintahan Nagari juga melaksanakan program yang dicanangkan oleh pemerintahan level di atasnya seperti pemerintahan daerah maupun pemerintahan pusat (Akmal & Nurhabibi, 2020).

Pelaksanaan program pemerintahan nagari ini tidak lepas dari peran pemerintahan Nagari itu sendiri, diantaranya peran pemerintah nagari yaitu bertanggung jawab terhadap kemajuan ekonomi, sosial dan budaya bahkan pendidikan (Aromatic et al., 2021). Dengan terlaksananya program tersebut maka diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Namun pelaksanaan program-program yang sudah direncanakan dengan baik tersebut tidak luput dari masalah-masalah yang terus terjadi dalam pemerintahan nagari (Syamsurizaldi, Annisa Aulia Putri, 2019). Dengan terjadinya masalah-masalah diberbagai sektor dan program tersebut, ini akan menjadi hambatan yang membuat tujuan akhir dari penyelenggaraan pemerintahan Nagari yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat jadi semakin susah untuk dicapai (Bila & Saputra, 2019).

Berbagai hambatan yang sering dihadapi oleh pemerintahan Nagari diantaranya adalah keterbatasan Sumber Daya baik sumber daya manusianya maupun sumber daya modal (P, 2011). Keterbatasan sumber daya modal akan menyebabkan kurangnya kemampuan Pemerintahan Nagari dalam membiayai program-program yang sudah direncanakan sebelumnya, baik program pembangunan maupun layanan publik. Sedangkan kekurangan sumber daya manusia akan mengakibatkan program tidak bisa berjalan dengan efektif, walaupun program tersebut sudah didanai sekalipun (P, 2011). Hal ini menjadi sorotan yang menarik sehingga perlu penulis definisikan masalah-masalah yang sering terjadi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat.

Dengan telah terdefiniskannya masalah-masalah yang sering terjadi dalam penyelenggaraan

pemerintahan Nagari, penulis berhadapan tulisan ini bisa menjadi referensi bagi akademisi maupun stakeholder dalam mengambil tindakan dalam merencanakan program-program yang akan dilaksanakan atau diembankan ke pemerintahan Nagari. tulisan ini juga bisa menjadi patokan untuk perbaikan pada pelaksanaan pemerintahan Nagari. dengan adanya sorotan terhadap masalah-masalah tertentu, maka diharapkan nantinya masalah yang krusial atau paling banyak dihadapi oleh pemerintahan Nagari bisa menjadi prioritas untuk segera di tuntaskan atau di dampingi.

Tulisan ini akan menyajikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh beberapa Nagari yang ada di beberapa Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat. Tulisan ini akan membahas bagaimana kondisi pemerintahan Nagari dalam melaksanakan tugasnya, dan kemudian akan memberikan saran perbaikan dan menjadi acuan pihak berwenang untuk melaksanakan perbaikan kedepannya, terutama pada tahun 2024. Semoga tulisan ini bisa membuka wawasan kita bersama terkait bagaimana dinamika pelaksanaan Pemerintahan Nagari di Provinsi Sumatera Barat.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan berlandaskan pada filsafat post positivisme (Moleong, 2019). Penelitian kualitatif ini digunakan agar kita bisa memahami sesuatu di balik fenomena (Sugiyono, 2013). Metode kualitatif, digunakan untuk mengumpulkan data dan menganalisisnya sesuai dengan data yang diperoleh dan disajikan dalam bentuk kata-kata tulis maupun lisan dari pihak-pihak yang terkait (Strauss & Corbin, 1997) (Sutopo, 2006).

Informan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa Nagari yang ada di Provinsi Sumatera Barat yang dikelompokkan berdasarkan masalah-masalah krusial yang mereka hadapi. Data dikumpulkan dengan melakukan wawancara. Wawancara menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur (unstructured) dan bersifat terbuka (open-ended) yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini dari partisipan (Strauss & Corbin, 1997).

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilaksanakan di berbagai nagari, penulis bisa mengelompokkannya berdasarkan masalah-masalah yang dihadapi oleh Nagari-Nagari tersebut. Maka penulis bisa mendeskripsikan hasil dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Masalah pelaksanaan BUMNag (Badan Usaha Milik Nagari)

Berdasarkan hasil penelitian ada 5 Nagari yang memunyai masalah dalam pelaksanaan BUMNagnya dengan berbagai kemdalanya, yaitu:

Nagari Limo Koto Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung. Beberapa masalah yang diidentifikasi meliputi kurangnya pengelolaan, keterbatasan modal, kendala dalam pembayaran, dan kurangnya perhatian terhadap peluang usaha. Terdapat juga kendala terkait upah/gaji yang diterima oleh masyarakat yang bekerja di BUMNag. Meskipun BUMNag telah memiliki beberapa program seperti Kelompok Wanita Tani, Kredit Mikro Nagari, usaha fotocopy, dan lainnya, kontribusinya terhadap wilayah setempat masih terbatas. Diperlukan upaya untuk meningkatkan pengelolaan, sumber daya, dan perhatian terhadap peluang usaha agar BUMNag dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi Nagari Limo Koto.

Nagari Sungai Tunu Kabupaten Pesisir Selatan. Kendala Yang Dihadapi dalam Pemberdayaan Masyarakat di Nagari Pasir Sungai Tunu ada dua, yaitu kendala internal dan eksternal. Yang pertama kendala internal berasal dari BUMNag itu sendiri, yaitu kurangnya tim penyuluh dari BUMNag, menyebabkan kurang optimalnya proses pemberdayaan

masyarakat di Nagari Sungai Tunu. Kedua kendala eksternal berupa masih rendahnya partisipasi dan kesadaran masyarakat. Masyarakat menganggap program dari BUMNag hanya buang-buang waktu saja serta menganggap program BumNag spele. Hal tersebut dilatar belakangi oleh pengetahuan Sumber Daya manusia yang masih rendah.

Nagari Koto Kaciak. Pemerintahan nagari Koto Kaciak Selaku badan yang mencetuskan berdirinya Badan Usaha Milik Nagari Lubuak Bakilek Malam (BUMNAG LBM) eksistensi dan peran tidak hanya difokuskan sebatas pencetus berdirinya BUMNAG LBM saja. Namun untuk lebih mengoptimalisasikan serta menumbuhkan kemajuan dari berdirinya BUMNAG LBM ke arah yang diharapkan perlunya peningkatan peran dari pemerintahan nagari Koto Kaciak. Adapun peran pertama pemerintahan nagari Koto Kaciak pada Badan Usaha Milik Nagari Lubuak Bakilek Malam (BUMNAG LBM) ialah sebagai pelindung. Pelindung yang dimaksudkan dalam konteks ini ialah melindungi BUMNAG LBM baik secara hukum, administrasi dan lain sebagainya. Adapun peran kedua dari pemerintahan nagari Koto Kaciak pada Badan Usaha Milik Nagari Lubuak Bakilek Malam ialah sebagai penasehat. Wujud dari peran pemerintahan nagari Koto Kaciak sebagai penasehat BUMNAG LBM ialah dengan menjadi penasehat dalam setiap manajemen operasional Badan Usaha Milik Nagari Lubuak Bakilek Malam (BUMNAG LBM).

Nagari Katapiang, Kabupaten Padang Pariaman. Berdasarkan Program yang telah dilaksanakan oleh BUMNag Nagari Katapiang melalui pernyataan Sekretariat BumNag nagari Katapiang pada 08 Desember 2023 adapun kendala yang di hadapi BUMNag dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yaitu :Kurang nya Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan BUMNag dan Kurangnya Pengalaman masyarakat terhadap pengelolaan BUMNag di Nagari Katapiang.

Nagari Tabek Patah, Kabupaten Tanah Datar. BUMNag Nagari Tabek Patah itu fakum dan para anggotanya mengundurkan diri dikarenakan perbedaan pemikiran. Tetapi pemerintah nagari tabek patah telah melakukan hal-hal guna untuk menanggulangi permasalahan tersebut, seperti dalam permasalahan pendanaan dengan melakukan kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam melakukan kegiatan seperti melakukan gotong royong dan mengintensifkan kegiatan penerimaan nagari itu berupa pendapatan asli nagari guna untuk menanggulangi permasalahan dana tersebut.

2. Pelaksanaan program Nagari yang tidak efektif.

Tidak semua program-program yang sudah direncanakan oleh pemerintahan Nagari berjalan dengan baik, program ini adakalanya mendapatkan hambatan maupun kegagalan, hal-hal ini terjadi pada beberapa Nagari Berikut:

Nagari Aia Manggih Utara, kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman. Dalam menjalankan setiap program-program nagari mengalami kendala dalam menjalankan program akibat ketiadaan dana desa. Nagari ini menghadapi tantangan serius karena tidak mendapatkan alokasi dana desa pada tahun tertentu, yang menghambat implementasi berbagai program lainnya seperti program pembangunan. Meskipun memiliki visi misi yang jelas dan berupaya menjalankan program-program sesuai dengan prioritas, keterbatasan sumber daya keuangan menjadi hambatan utama disebabkan juga Nagari Aia Manggih Utara ini baru berjalan satu tahun.

Nagari Tandikek, Kabupaten Padang Pariaman. Pada Nagari ini terdapat masalah dalam implementasi peraturan nagarinya. Dalam penyelenggaraannya Pemerintah Nagari Tandikek

tidak bisa membuat atau menetapkan sesuatu yang akan menjadi Peraturan Nagari, hal itu terjadi karena adanya beberapa penghambat atau faktor untuk Peraturan Nagari ditetapkan. Diantara dari faktor tersebut adalah seperti adanya pertentangan atau bentrok dengan adat kebiasaan masyarakat Nagari Tandikek sehingga dibutuhkan kerjasama dengan Niniak Mamak untuk memutuskan Peraturan Nagari serta memberikan penjelasan terkait dampak dan tujuan dari adanya suatu Peraturan Nagari bagi masyarakat Nagari Tandikek.

Nagari Koto Tangah Simalanggang, Payakumbuh. Dalam program-program yang telah dijalankan oleh nagari terdapat beberapa kendala atau permasalahan yang dihadapi oleh nagari yaitu visi dan misi nagari tidak bisa tercapai 100% dikarenakan keterbatasan dana yang diberikan oleh pusat sebab dana tersebut sudah memiliki porsi dan pos-posnya tertentu sehingga pemerintah nagari mengalami kendala dalam menetapkan skala prioritas kegiatan dan tercapainya visi dan misi nagari. Dalam menanggapi kendala tersebut pemerintah nagari menginginkan dana desa yang akan turun dari pusat agar diserahkan sepenuhnya pengelolaannya kepada nagari, dan pemerintah pusat pun tidak perlu meragukannya sebab sudah ada penanggung desa, inspektorat, BPKP yang akan memeriksa atau mengawal keuangan nagari sesuai dengan ADD dan kebutuhan masing-masing nagari pasti berbeda dan tidak akan sama, terkadang terdapat program yang lebih dibutuhkan dan di prioritaskan oleh masyarakat sedangkan dana dari pusat terbatas makan distuah terhambat jalannya program tersebut karena susah dalam mengelola dana.

3. Permasalahan pada pelayanan publik.

Ada beberapa Nagari juga yang mengemukakan bahwa mereka menghadapi masalah pada pelaksanaan pelayanan publiknya.

Nagari Tigo Koto Silungkang Kabupaten Agam. Untuk mengatasi permasalahan kurangnya pelayanan publik di Nagarinya, Pemerintah Nagari Tigo Koto Silungkang telah berupaya untuk menerapkan digitalisasi di nagari tersebut, salah satunya dengan memberikan pelatihan dan sosialisasi tentang digitalisasi kepada masyarakat. Selain itu, Pemerintah Nagari Tigo Koto Silungkang juga berupaya untuk meningkatkan akses internet di nagari tersebut.

Nagari Ampang Parak, Kecamatan SUTERA, Kabupaten Pesisir Selatan. Pemerintah Nagari Amping Parak belum bertransformasi secara digitalisasi dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, dimana dalam setiap layanan surat menyurat yang dibutuhkan oleh masyarakat itu mereka harus datang langsung ke kantor baik dalam pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), Surat Keterangan Usaha (SKU), Surat Keterangan Meninggal Dunia dan berbagai layanan surat menyurat lainnya. Hal ini dikarenakan faktor dari kesiapan masyarakat itu sendiri yang menjadi kendala utama digitalisasi pelayanan publik pada pemerintahan Nagari Amping Parak. Sedangkan, faktor penghambat utama sehingga kinerja pegawai pemerintahan tingkat nagari tidak efektif adalah karena kurangnya anggaran dalam mempekerjakan tenaga kerja sesuai bidangnya, hal ini justru juga menimbulkan terjadinya double job untuk beberapa pekerja di kantor wali nagari sehingga membuat pekerja keteteran dan banyak pekerjaan yang tidak terselesaikan sesuai waktunya.

4. Masalah yang terjadi pada lembaga Pemerintahan Nagari

Masalah-masalah ternyata tidak hanya muncul dari dalam organisasi pemerintahan Nagari sendiri namun juga bisa terjadi pada lembaga yang ada dalam pemerintahan nagari itu sendiri, diantaranya yaitu KAN.



Nagari Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman. Kerapatan Adat Nagari Kayutanam berperan penting dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Nagari Kayutanam. Serta Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kayutanam juga mengklasifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan KAN dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat tersebut . Selain itu, Kerapatan Adat Nagari Kayutanam juga menjelaskan proses penyelesaian dari sengketa tanah ulayat yang terjadi di Nagari Kayutanam . Namun dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Nagari Kayutanam tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kayutanam melainkan sampai ke proses hukum.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa ada 4 masalah yang sering terjadi di berbagai Nagari di Provinsi Sumatera Barat yaitu: Masalah pelaksanaan BUMNag (Badan Usaha Milik Nagari) ada 5 Nagari, Pelaksanaan program Nagari yang tidak efektif ada 3 nagari, Permasalahan pada pelayanan publik ada 2 nagari, Masalah yang terjadi pada lembaga Pemerintahan Nagari ada 1 nagari. Dari hasil penelitian, kita memperoleh keterangan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari masih memiliki dinamika yang sangat beragam, masalah yang dihadapi juga sangat beragam. Untuk itu pada dasarnya memang masih dibutuhkan perhatian yang lebih baik lagi pada pemerintahan nagari dalam melaksanakan Tugas-Tugasnya. Pendampingan dari level pemerintahan yang lebih tinggi serta pendampingan dari stakeholder lain seperti perguruan tinggi dalam program pemberdayaan masyarakatnya juga sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan dinamika permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan Nagari ini.

Daftar Pustaka

- Akmal, A. D., & Nurhabibi, P. (2020). *Academic Manuscript in the Formulation of Nagari Rules*. 125(Icpapg 2019), 297–303. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200305.211>
- Aromatica, D., Harza, Z., & Diego, D. (2021). Membantu Nagari Membangun Melalui Penyusunan Rencana Penguatan Kelembagaan. *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 824–828. <https://doi.org/10.31004/cdj.v2i3.2618>
- Asfarina, S., & Frinaldi, A. (2019). Participatory Approaches in Formulation of Public Policy at Nagari Governance Level. *Jurnal Teori Dan Riset Administrasi Publik*, 9(2), 141–149. <http://jtrap.ppj.unp.ac.id/index.php/JTRAP/article/view/15>
- Berita Pemerintah Kabupaten Tanah Datar - Hidupkan Filosofi Gotong Royong, Nagari Tagueh Diusung Hadapi Pandemi Covid-19*. (n.d.).
- Bila, A., & Saputra, B. (2019). Strategi Collaborative Governance dalam Pemerintahan. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 9(2), 205.
- Moleong, L. J. (2019). Moleong, ” Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi”. Bandung : Remaja Rosdakarya. *PT. Remaja Rosda Karya*.
- P, S. S. (2011). Manajemen Sumber Daya Manusia. *PT Bima Aksara, Jakarta*.
- Rahmadoni, J., Akbar, R., & Ulya, R. (2022). *ANALYSIS OF NAGARI MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM EVALUATION (SIMNAG) USING PIECES AND UAT METHODS*. 4(1), 512–521.



- Rozikin, M. (2019). Memperkuat Ketahanan Masyarakat Berbasis Social Capital Pada Era Otonomi Desa (Studi Di Desa Pandansari, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 25(2), 204. <https://doi.org/10.22146/jkn.44904>
- Strauss, A., & Corbin, J. (1997). Dasar-dasar Penelitian Kualitatif, Prosedur, Teknik dan Teori Grounded. In *Surabaya: PT Bina Ilmu*.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Sugiyono. 2013. "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D." Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. <https://doi.org/10.1. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D>.
- Sutopo, H. B. (2006). Metodologi Penelitian Kualitatif; Dasar Teori dan Penerapannya dalam Penelitian. In *Edisi-2. Universitas Sebelas Maret, Surakarta*.
- Syamsurizaldi, Annisa Aulia Putri, S. A. (2019). Model Collaborative Governance Pada Nagari Rancak Di Provinsi Sumatera Barat Collaborative Governance Model At Nagari Rancak in West Sumatra Province. *Jurnal Pembangunan Nagari*, 4(1), 99–121.